



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini dapat terlaksana dengan baik.

Perubahan Renja PD BPBD Kota Yogyakarta didasarkan pada pelaksanaan dan evaluasi Renja PD BPBD Kota Yogyakarta 2019 hingga triwulan II Tahun Anggaran 2019, prioritas RKPD Tahun 2019 dan Renstra BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Perubahan ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja BPBD Kota Yogyakarta pada tahun anggaran yang berjalan.

Demikian Perubahan Renja BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini disusun dengan harapan pembangunan di Kota Yogyakarta dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Yogyakarta,

2019

KEPALA PELAKSANA BPBD

KOTA YOGYAKARTA



HARI WAHYUDI, SE

NIP. 19650206 199203 1 009

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019	II-1
2.1. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.....	II-1
2.2. Analisis Gambaran Pelayanan PD.....	II-5
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	II-6
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaah Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran PD.....	III-1
3.3. Program dan Kegiatan.....	III-2
BAB IV : PENUTUP	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah menyusun RPJP Daerah Kota Yogyakarta dan RPJM Daerah Kota Yogyakarta. Sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Yogyakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Kota Yogyakarta. Renstra BPBD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi dan bersifat indikatif.

Dokumen akhir dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.

Perubahan Renja PD BPBD Kota Yogyakarta tahun 2019 disusun berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah. Perubahan Renja PD dilakukan untuk mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program PD lainnya yang ada di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Dalam daerah istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019.
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagai :

- a. Mengkaji RKPD Kota Yogyakarta berdasarkan evaluasi kinerja PD sampai dengan Triwulan II tahun anggaran berjalan, evaluasi pencapaian target Renstra PD, usulan masyarakat/ pemangku kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dalam perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini adalah untuk :

- a. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- e. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LAKIP, LPPD, dan LKPJ.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

- 2.1 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
- 2.2 Analisis Gambaran Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2019 sampai dengan triwulan II, mengacu pada APBD Kota Yogyakarta. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, BPBD Kota Yogyakarta telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2019 yang ditargetkan sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp. 4.273.768.970,- dari total anggaran Rp 10.512.391.170,-. Serapan keuangan sebesar Rp 1.830.694.551,- atau 42,84%. Adapun rincian dari realisasi anggaran Tahun 2019 dijabarkan pada Tabel 2.1.

Pada Tabel 2.1 memperlihatkan realisasi dari program/kegiatan yang dibandingkan dengan rencana target kinerja hasil/keluaran. Realisasi dari program/kegiatan ada yang tepat memenuhi target rencana hasil/keluaran yang direncanakan, namun ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target.

Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan predikat tinggi adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam.

Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan predikat sangat rendah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Keempat program ini memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan predikat sangat tinggi berdasarkan target fisik, sedangkan berdasarkan target keuangan secara keseluruhan mendapatkan predikat rendah dan sangat rendah. Rendahnya capaian target keuangan disebabkan oleh beberapa faktor :

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket				
					Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW II Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan		
							8	9	10	11	12	13	14	15									16=14/10	17=15/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
Rata-rata capaian kinerja															95.39%	46.75%			0.00%	0.00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Total anggaran dari seluruh program															10,512,391,170	4,273,768,970			1,830,694,551					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)																	86.20%	42.84%			0.00%	0.00%		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)																	Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		: 1. Perencanaan yang baik (tata kala kegiatan dan target)																						
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		: 1. Pengelolaan keuangan masih belum optimal																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan		:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun		:																						

Yogyakarta,

Disusun oleh
Kepala BPBD

2019

Yogyakarta,

Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

2019

Hari Wahyudi, SE.
NIP. 196502061992031009

Drs.Heri Karyawan
NIP. 195911141989031004

1. Kurangnya jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur untuk menjalankan program/kegiatan tersebut.
2. Belanja modal yang terealisasi diakhir triwulan II belum dapat diproses administrasi keuangannya.
3. Tidak terealisasinya target yang bersifat kondisional meliputi kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana pada fase penanganan dan pasca bencana.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2019 sampai dengan triwulan II tersebut diatas, maka perlu diambil Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target tersebut yaitu :

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran kembali dan diusulkan untuk perubahan anggaran tahun berjalan.
2. Mengoptimalkan anggaran dan SDM yang ada dalam rangka pencapaian target kinerja program.
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka untuk pencapaian target kinerja program.
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana agar tercapai target kinerja program.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah,
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian program di bidang penanggulangan bencana di daerah;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- c. Melaksanakan penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;

- d. Melaksanakan penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- f. Melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- g. Melaksanakan penyusunan, penetapan dan penginformasian peta resiko bencana;
- h. Melaksanakan pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan;
- i. Melaksanakan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- j. Melaksanakan pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- k. Melaksanakan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- l. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- n. Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- o. Melaksanakan pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2018, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra BPBD Kota Yogyakarta. Analisis pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kota Yogyakarta tergambar pada Tabel 2.2.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan PD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dan untuk menentukan peluang dan

tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

1. Koordinasi antara BPBD Kota Yogyakarta dengan BNPB agar ada keselarasan dalam hal Program Pembangunan, dan Penanggulangan Bencana melalui Rakornas dan Pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya manusia.
2. Koordinasi dan sinergi antara BPBD Kota Yogyakarta dengan BPBD Provinsi DIY dalam hal Program Pembangunan, dan Penanggulangan Bencana melalui Pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya manusia, bantuan penanganan bencana termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
3. Permasalahan yang dihadapi
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, diantaranya adalah:
 - a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana. seiring dengan perkembangan daerah maupun tuntutan peningkatan kualitas jasa keselamatan.
 - b. Kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis dibidang penanggulangan bencana
 - c. Belum adanya Sistem Informasi bencana sehingga kebijakan keselamatan belum didukung dengan data dan informasi yang akurat.
 - d. Masih lemahnya peran masyarakat dalam pengetahuan pencegahan dan penanggulangan bencana.
 - e. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur.

Table 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Indikator sasaran											
I	Persentase kampung tangguh bencana	-		40,00%	67,65%	73,53%	79,41%	36,00%	57,06%	40,00%	67,65%	
II	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100%		82,00%	84,00%	86,00%	88,00%	80,41%	83,45%	82,00%	84,00%	
III	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi	-		82,00%	84,00%	86,00%	88,00%	73,00%	100,00 %	82,00%	84,00%	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Indikator sasaran											
IV	Persentase penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	
V	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	
VI	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) sampai dinyatakan sah/legal											

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Indikator sasaran											
VIII	Persentase jumlah aparaturnegara dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	Persentase jumlah warga negara yang ikut gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat alat perlindungan diri	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat terselenggara tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dengan optimal.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi :

a. Faktor internal

(1) Kekuatan

- * Adanya peraturan perundang – undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana.
- * Dukungan yang cukup dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program – program kegiatan.
- * Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara BPBD dengan Instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.

(2) Kelemahan

- Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana seiring dengan perkembangan daerah maupun tuntutan peningkatan kualitas jasa keselamatan.
- Kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis dibidang bencana.
- Belum adanya Sistem Informasi bencana alam sehingga kebijakan keselamatan belum didukung dengan data dan informasi yang akurat.

b. Faktor Eksternal

Peluang (*Opportunities*)

1. Peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana sangat baik.
2. Teknologi dan sistem informasi penanggulangan bencana yang semakin baik.

3. Adanya program CSR dari pihak swasta untuk penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, bencana dan pasca bencana.

Ancaman (*Threats*)

1. Kondisi geologi dan klimatologi wilayah yang rawan gempa bumi dan cuaca ekstrim.
2. Pembangunan fisik yang semakin pesat sehingga mengurangi ruang terbuka publik sebagai jalur dan sarana evakuasi saat terjadi bencana.
3. Banyaknya perumahan di bantaran sungai.

4. Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan analisis fungsi dan ketugasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka selanjutnya dapat disusun rekomendasi dan catatan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019, yaitu :

1. Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul stakeholder yang ada baik internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat;
2. Mengedukasi masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana dengan membentuk kampung tangguh bencana terutama pada kawasan rawan bencana;
3. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal BNPB;
4. Meningkatkan kompetensi personil kebencanaan baik secara mandiri maupun dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh pusat dan pemerintah provinsi;
5. Membangun sistem informasi bencana baik pada fase pra bencana (informasi rawan bencana) maupun saat bencana (informasi kedaruratan dan ketersediaan logistik) yang terintegrasi ke seluruh stakeholder;
6. Meningkatkan fasilitasi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan bagi korban terdampak;

7. Meningkatkan kerjasama dengan swasta melalui program CSR baik pada fase pra bencana, bencana dan pasca bencana.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Kebijakan Nasional

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu RPJM kesatu (2005-2009), RPJM kedua (2010-2014), RPJM ketiga (2015-2019), dan RPJM keempat (2020-2025).

Pembangunan dalam RPJMN ketiga (2015-2019) diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. RPJMN (2015-2019) disusun sebagai penjabaran visi, misi dan agenda pembangunan (NAWACITA) Presiden terpilih.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMN (2015-2019) melalui pelaksanaan agenda pembangunan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, maka arah kebijakan umum penanggulangan bencana adalah *mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana* yang dilaksanakan melalui strategi :

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan Daerah;
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana;
3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Sedangkan sasaran strategik merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian program yang akan dijabarkan

lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (Performance Plan). Adapun tujuan strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta yaitu menurunkan risiko bencana.

Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Berikut ini adalah sasaran strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Hasil/Keluaran	Target 2019
Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	75,82%

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018 disusun dengan mengacu RKPD 2019 dan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 serta dengan tetap memperhatikan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun yang lalu sehingga program dan kegiatan yang akan datang tetap berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta merencanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini merupakan program rutin untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga rutin kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Program ini digunakan untuk pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat dan untuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini merupakan sarana peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis dan diklat.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah.
5. Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam yang terdiri dari kegiatan :

- a. Pencegahan Bahaya Bencana Alam
- b. Penanganan Bencana Alam
- c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

BPBD

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	546,038,980	600,965,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	52 kali	56 kali	121,620,000	168,520,000	1. Penambahan SPPD untuk Monev rehab rekon terkait dana hibah dari BNPB. Pelaksanaan monev dilaksanakan tiap triwulan di 4 lokasi. 2. Penambahan anggaran mamin untuk koordinasi pembentukan TIM Reaksi Cepat Terpadu
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan	16 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia	200 buah	200 buah	424,418,980	432,445,000	1. Ada penambahan gedung operasional eks SD Patangpuluhan. Sehingga menambah 5 jenis pemeliharaan meliputi = listrik, telpon, PDAM, wifi, dan pemeliharaan AC untuk kantor. 2. Penambahan alat peraga berupa maskot BPBD
		Materai 3000 yang tersedia	300 buah	300 buah			
		STNK Roda 6 yang terbayar	1 unit	1 unit			
		STNK Roda 4 yang terbayar	4 unit	4 unit			
		STNK Roda 3 yang terbayar	90 unit	90 unit			
		STNK Roda 2 yang terbayar	6 unit	6 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	36 Jenis	36 Jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	50 jenis	50 jenis			
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Pembayaran telepon	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Penggandaan	75.000 lembar	75.000 lembar			
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Komponen Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	40 jenis	41 jenis			
		Jasa Percetakan	15 jenis	15 jenis			
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 jenis	25 jenis			
		Pengadaan pakaian dinas Harian	12 stel	12 stel			
		Pengadaan pakaian kerja lapangan	12 stel	12 stel			
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis	5 jenis			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa KIR	1 jenis	1 jenis			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	551,790,000	704,790,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	3 jenis	4 jenis	265,000,000	398,000,000	Adanya penambahan anggaran sebesar Rp.133.000.000 dengan rincian Rp.125.000.000 (Rp.100.000.000 pemeliharaan SD Patangpuluhan; Rp.25.000.000 untuk POS 1); belanja perencanaan R.5.000.000; belanja pengawas Rp.3.000.000
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 6	1 unit	1 unit	286,790,000	306,790,000	Penambahan jenis pemeliharaan kendaraan karena turun mesin (1 unit ranger)
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	5 unit	5 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 3	90 unit	90 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	6 unit	6 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	20,000,000	20,000,000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali	2 kali	20,000,000	20,000,000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	1,485,000	1,485,000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renja, PK, RKA, DPA, RKT)	5 dokumen	5 dokumen	1,485,000	1,485,000	
		Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
5	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	84%	84%	9,393,077,190	9,556,770,000	
		Persentase kampung tangguh bencana	67,65%	67,65%			
		Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi	84%	84%			
5.1	Pencegahan Bahaya Bencana Alam	Kampung Tangguh Bencana (KTB)	15 kampung	15 kampung	3,827,289,460	3,820,540,000	Adanya penghapusan sisa uang transport pelatihan dan penghapusan sisa belanja modal (HT)
		Pelatihan Penanggulangan Bencana	20 kali	20 kali			
		Apel Siaga Bencana	1 kali	1 kali			
		Kerja Bakti Kesiapsiagaan Bencana	20 kali	20 kali			
5.2	Penanganan Bencana Alam	Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)	12 bulan	12 bulan	1,345,352,730	1,515,795,000	1. Penambahan belanja TT 2 orang selama 4 bulan untuk operasional gudang baru; penambahan untuk perawatan chainsaw KTB 50 unit. 2. Pengadaan motor roda 3 untuk ambulance dan pengadaan peralatan wall climbing untuk olahraga
		Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)	12 bulan	12 bulan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Manajemen Logistik	12 bulan	12 bulan			
		Pelatihan Kedaruratan Bencana	4 kali	4 kali			
		Asesmen dan Evakuasi Awal Bencana	50 kali	70 kali			
		Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Awal Bencana	-	2 jenis			
5.3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Inventarisasi Kerusakan dan Taksasi	12 bulan	12 bulan	4,220,435,000	4,220,435,000	
		Monitoring daerah rawan bencana	12 bulan	12 bulan			
		Kerja bakti pasca kejadian bencana	20 kali	20 kali			
		Rehabilitasi Talud Pasca Bencana Siklon Cempaka Tahun 2017	1 lokasi	1 lokasi			
		Total			10,512,391,170	10,884,009,000	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan PD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 – 2025, RPJM Provinsi DIY, RPJPD Kota Yogyakarta dan RPJMD Kota Yogyakarta. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi BPBD Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan PD tahun 2019.

Yogyakarta, 2019

Kepala Pelaksana



HARI WAHYUDI, SE

NIP. 19650206 199203 1 009